

Checklist Persyaratan Perizinan/Non Perizinan Bidang Pekerjaan Umum

Izin Pembangunan Prasarana Reklamasi

Data Pemohon

Nama Pemohon : _____
 (Nama Perusahaan, bila merupakan badan hukum)
 Alamat Pemohon : _____
 (Alamat Perusahaan, bila merupakan badan hukum)
 No. Telp : _____

Persyaratan Dasar :

Surat Permohonan

- Surat permohonan yang di dalamnya terdapat pernyataan kebenaran dan keabsahan dokumen & data di atas kertas bermaterai Rp 6.000

Identitas Pemohon

Jika Warga Negara Indonesia (WNI):

- Kartu Tanda Penduduk (KTP)
 Kartu Keluarga (KK)
 Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Jika Warga Negara Asing (WNA):

- Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) atau VISA
 Paspor

Jika yang mengajukan izin adalah Badan Hukum

- Akta pendirian (Kantor Pusat dan Kantor Cabang, jika ada) dan SK Pengesahan yang dikeluarkan oleh:
 Kemenkumham, jika PT dan Yayasan
 Kementrian, jika Koperasi
 Pengadilan Negeri, jika CV
 Akta Perubahan SK dan SK Perubahan yang dikeluarkan oleh Kemenkumham, jika Akta Pendirian mengalami perubahan
 NPWP Badan Hukum

Jika dikuasakan

- Surat kuasa di atas kertas bermaterai RP 6.000
 KTP orang yang diberi kuasa

Prasyarat :

- Persetujuan Prinsip Reklamasi dari Gubernur [Fotokopi]
 Dokumen Lingkungan [Fotokopi]
 Persetujuan Prinsip Trase Jalan, Jembatan, Saluran, atau Utilitas [Fotokopi]
 Persetujuan Analisa Dampak Lalu Lintas (Andalalin)* [Fotokopi]
 Pengesahan Gambar Perencanaan Arsitektur (dahulu Rencana Tata Letak Bangunan (RTLBB)) atau Ketetapan Rencana Kota (KRK) [Fotokopi]
 Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT) jika luas lahan >5000m² [Fotokopi]
 Izin Membangun Prasarana (IMP) terdahulu**

Persyaratan :

- Persyaratan Dasar
 Persyaratan tambahan:
- Untuk jembatan:
 - Desain Teknis Detail / Detailed Engineering Design (DED) yang di dalamnya dilengkapi dengan Perhitungan Konstruksi, RAB, Kajian Sistem Tata Air dari konsultan perencana yang mempunyai IPTB (IPTB harus dilegalisasi sesuai dengan nama kegiatan yang diajukan)
 - Hasil penyelidikan tanah (uji laboratorium) yang menggambarkan tanah keras (end-bearing) dan jenis tanah pada lokasi rencana jembatan
 - Rekomendasi teknis dari Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane untuk kegiatan di atas sungai yang menjadi kewenangan Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia
 - Gambar rencana pengukuran peil bentang jembatan dari UPT Dinas Bina Marga
 - Untuk Saluran:
 - Desain Teknis Detail / Detailed Engineering Design (DED) yang di dalamnya dilengkapi dengan Perhitungan Konstruksi, RAB, Kajian Sistem Tata Air dari konsultan perencana yang mempunyai IPTB (IPTB harus dilegalisasi sesuai dengan nama kegiatan yang diajukan)
 - Untuk Jalan:
 - Desain Teknis Detail / Detailed Engineering Design (DED) yang di dalamnya dilengkapi dengan Perhitungan Konstruksi, RAB, Kajian Sistem Tata Air dari konsultan perencana yang mempunyai IPTB (IPTB harus dilegalisasi sesuai dengan nama kegiatan yang diajukan)
 - Rekomendasi teknis dari Balai Pelaksana Jalan Wilayah IV untuk kegiatan pada jalan nasional kewenangan Kementerian Pekerjaan Umum
 - Untuk Inrit:
 - Desain teknis detail dari konsultan perencana yang mempunyai IPTB (IPTB harus dilegalisasi sesuai dengan nama kegiatan yang diajukan)

*) khusus untuk jalan dan jembatan jika terletak di persimpangan jalan atau lalu lintas padat

**) dengan dasar spesifikasi IMP perpanjangan yang diajukan masih sama dengan IMP terdahulu

Catatan
